

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengidentifikasian, penggolongan, dan pelaporan sebuah transaksi ekonomi atau kejadian yang menghasilkan data kuantitatif yang bersifat keuangan dan berguna untuk pengambilan keputusan.² Laporan keuangan yang merupakan data kuantitatif yang dihasilkan dari kegiatan akuntansi. Laporan keuangan berisikan informasi keuangan yang dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan untuk memperoleh gambaran posisi keuangan dan perkembangan usaha dari suatu perusahaan.

Perusahaan mempunyai tanggung jawab menyusun laporan keuangan dan informasi tambahan yang runtut dan akurat. Dalam penyusunan laporan keuangan, perusahaan harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Standar akuntansi merupakan pedoman dan aturan bagi perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuan dibuatnya standar akuntansi ini agar laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan mempunyai kesamaan konsep, prosedur, metode, dan penyajian.

Di Indonesia, terdapat empat standar akuntansi keuangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Pertama, Standar Akuntansi

² Jumaiyah, *Pengantar Akuntansi Teori & Praktik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 2

Keuangan (SAK), standar keuangan ini digunakan oleh perusahaan dengan akuntabilitas publik dan terdaftar pada pasar modal. Standar Akuntansi Keuangan ini mengadopsi IFRS yang merupakan standar akuntansi keuangan internasional. Kedua, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang juga mengadopsi IFRS namun dengan beberapa penyederhanaan. Ketiga, Standar Akuntansi Syariah, standar ini disusun sehubungan dengan semakin berkembangnya transaksi dan perusahaan yang berbasis syariah. Standar Akuntansi Syariah disusun atas persetujuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Keempat, Standar Akuntansi Pemerintah, standar ini disusun dan digunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan.³

Standar akuntansi yang telah ditetapkan di Indonesia mempunyai kebijakan sendiri dalam penyusunan laporan keuangan di suatu perusahaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), terdapat empat komponen laporan keuangan, antara lain laporan laba rugi, neraca, arus kas, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan.⁴ Berbeda dengan Standar Keuangan Syariah, komponen laporan keuangan yang wajib disajikan oleh perusahaan syariah antara lain laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan

³ Oman Rusmana dkk, *Akuntansi Pemerintahan Daerah*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017), hlm. 6

⁴ IKatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2009), hlm. 17

keuangan.⁵ Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintah, komponen laporan keuangan dalam instansi pemerintah antara lain, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.⁶

Berdasarkan komponen laporan keuangan yang wajib disajikan oleh perusahaan, terdapat perbedaan penyajian laporan keuangan perusahaan swasta dan instansi pemerintah. Salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah tidak adanya komponen laporan laba rugi pada instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan, instansi pemerintah tidak berorientasi pada keuntungan. Pendapatan yang diperoleh instansi pemerintah bersumber dari APBN dan APBD. Pendapatan APBN bersumber dari penerimaan pajak di dalam dan luar negeri, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah. Sehingga, laporan yang disajikan oleh instansi pemerintah bukanlah laporan laba rugi melainkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan pendapatan tersebut, karena sumber pendapatan tersebut berasal dari masyarakat. Laporan pertanggungjawaban tersebut merupakan upaya mewujudkan prinsip *Good Governance* pada instansi pemerintah.

Good Governance (tata kelola pemerintahan) adalah dasar dalam melaksanakan pemerintahan dan menjalankan fungsi pelayanan publik oleh

⁵ IKatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2009), hlm. 101.3

⁶ Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*, (Jakarta: Tidak Diterbitkan, 2010), hlm. Lampiran I.01-8

pemerintah.⁷ Prinsip *Good Governance* mempunyai delapan karakteristik utama yaitu, partisipasi masyarakat, berorientasi pada consensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif, dan penegakan/supermasi hukum.⁸ Dalam hal ini, laporan pertanggungjawaban terhadap pendapatan yang diterima pemerintah merupakan upaya mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Bentuk upaya untuk mewujudkan laporan keuangan instansi yang akuntabel dan transparansi yaitu dengan menyampaikan laporan tersebut tepat pada waktunya, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan. Standar Akuntansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berisikan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan ini diperuntukkan untuk instansi di lingkup pemerintahan, seperti halnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah wilayah, serta unit-unit di dalam pemerintah pusat dan wilayah.

Salah satu aturan Standar Akuntansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah penerapan pemakaian basis akuntansi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat 3 lampiran penyusunan laporan keuangan pemerintah, yaitu: Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, yang selambat-lambatnya dimulai tahun 2014, Lampiran II tentang Standar Akuntansi

⁷ Haryanto; Sahrudin; Arifuddin, *Akuntansi Sektor Publik*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 7

⁸ Nuramalia Hasanah dan Achmad Fauzi, *Akuntansi Pemerintahan*, (Bogor: In Media, 2017), hlm. 44

Pemerintah berbasis kas menuju akrual atau masa peralihan, yang berakhir pada tahun 2014, Lampiran III tentang proses penyusunan Standar Akuntansi berbasis akrual.⁹

Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dinilai dapat memberikan informasi keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Akuntansi berbasis akrual dianggap mampu mendukung terlaksananya perhitungan berbagai macam biaya pelayanan public yang disediakan oleh pemerintah dengan wajar. Sehingga, terjadilah penyempurnaan komponen laporan keuangan pemerintah. standar akuntansi pemerintah berbasis kas hanya mewajibkan 4 jenis laporan keuangan, diantaranya, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. sedangkan, standar akuntansi pemerintah berbasis akrual mewajibkan 7 jenis laporan keuangan yang harus disajikan oleh instansi pemerintah, diantaranya, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.¹⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah telah menetapkan penggunaan akuntansi berbasis akrual pada pencatatannya. Namun, pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 2 disebutkan bahwa laporan realisasi anggaran disusun dan disajikan dengan menggunakan basis kas. Hal ini berarti, pendapatan pada laporan realisasi anggaran diakui ketika kas diterima pada rekening kas

⁹ Ibid., hlm. 14

¹⁰ Jamaluddin Majid, Akuntansi Sektor Publik, (Gowa: Pusaka Almailda, 2019), hlm.

negara/daerah atau entitas pelaporan, dan belanja diakui saat kas dikeluarkan dari rekening kas. Laporan realisasi anggaran adalah laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan kegiatan yang telah dianggarkan sebelumnya dengan realisasi yang terjadi dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah tersebut sehingga dapat dilakukan evaluasi atas kinerja yang dicapai dalam suatu daerah tersebut.¹¹

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satuan kerja di bawah naungan pemerintah daerah selaku pengguna anggaran. Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat berbentuk dinas, badan, dan kantor/satuan. Sebagai satuan kerja yang menggunakan anggaran berupa APBN/APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyelenggarakan dan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dikelola sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam hal ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun laporan realisasi anggaran dalam rangka memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. DPMPTSP telah menyusun laporan realisasi anggaran yang merupakan komponen laporan keuangan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Penelitian terdahulu mengenai laporan realisasi anggaran dilakukan oleh Muhamad R. D. Lompang dkk pada tahun 2022 menunjukkan adanya

¹¹ Christine M.S Tatang, Winston Pontoh, dan Peter M.Kapojos, *Evaluasi Penerapan PSAP No. 2 atas Laporan realisasi anggaran*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum 5(2) 1261-1268 (Manado: Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 2022), hlm. 1262

kesesuaian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 dengan laporan realisasi anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kota Manado. Kesesuaian diukur dengan membandingkan semua aspek pada format laporan realisasi anggaran yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ilustrasi PSAP 02.B, tanpa menunjukkan hasil perhitungan tingkat kesesuaiannya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad R. D. Lompang, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Reza mengemukakan tingkat kesesuaian penyusunan laporan realisasi anggaran dengan menggunakan rumus Dean J. Champion, dan menunjukkan hasil kesesuaian sebesar 100%.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari bagaimana penyajian dan penyusunan laporan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, serta apakah dalam penyajian dan penyusunan laporan realisasi anggaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Nomor 2. Oleh karena itu, penulis mengangkat sebuah judul **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 Tentang Laporan realisasi anggaran (Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penyusunan laporan realisasi anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri?
2. Apakah penyusunan laporan realisasi anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan realisasi anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara penyusunan laporan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kediri dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

D. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pengidentifikasian masalah diperlukan guna menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, sehingga hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini terbatas pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 tentang

laporan realisasi anggaran yang disajikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terkait dengan laporan realisasi anggaran. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber rujukan, bahan literatur, dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan keilmuan khususnya pada akuntansi pemerintah terkait dengan laporan realisasi anggaran.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menambah dan mengembangkan wawasan penulis terkait penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran pada instansi pemerintah khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

b. Untuk UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi pihak kampus yang membahas terkait dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 Tentang laporan realisasi anggaran yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

- c. Untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan, sumber informasi, dan sumber rujukan untuk mengulas kembali kesesuaian laporan realisasi anggaran yang ada dengan format laporan realisasi anggaran dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2.

- d. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran serta mewujudkan kesamaan pikiran dan kesatuan pandangan, perlu ditegaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Sesuai dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 Tentang Laporan realisasi anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri”, berikut ini uraian dari istilah-istilah yang ada:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) yang bertujuan untuk mengetahui keadaan sebenarnya/sebab-musabab/duduk perkaranya¹²
 - b. Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi samapi dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.¹³
 - c. Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di instansi pemerintah.¹⁴
 - d. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi perbandingan antara anggaran dan realisasi yang berguna untuk mengevaluasi keputusan pengalokasian sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.¹⁵
2. Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 Tentang Laporan realisasi anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dimaksudkan untuk meneliti bagaimana kesesuaian laporan

¹² Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 60

¹³ Badan Pemeriksa Keuangan, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*, (Jakarta: Tidak Diterbitkan, 2010), hlm. 3

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2

¹⁵ *Ibid.*, hlm. Lampiran I.03 PSAP 02 - 1

realisasi anggaran yang telah disajikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi tentang keseluruhan komponen yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi. Adapun sistematika pembahasan proposal skripsi ini adalah:

Bagian awal, yang terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul dan halaman persetujuan pembimbing.

Bab I Pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi penelitian dan Batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan proposal skripsi.

Bab II Landasan Teori terdiri dari: kajian tentang konsep-konsep yang mendasari masalah yang dikaji.

Bab III Metode penelitian terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber dan jenis data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis.

Bab IV Hasil Penelitian terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang paparan data yang telah didapatkan, dan temuan yang didapatkan dalam penelitian.

Bab V Pembahasan berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintetis antara temua penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

Bab VI Penutup terdiri dari: kesimpulan dan saran.